



**RENCANA KERJA  
(RENJA)  
DINAS PERHUBUNGAN**

**KOTA SINGKAWANG  
TAHUN 2023**

**DINAS PERHUBUNGAN  
KOTA SINGKAWANG  
2023**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

**R**encana Kerja Organisasi Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) untuk periode jangka pendek satu tahun ke depan. Fungsi Renja OPD adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi OPD dalam membangun daerah sebagai turunan dari Rencana Strategis dalam pembangunan daerah. RENJA OPD memuat hasil evaluasi renja tahun lalu, dan memuat tujuan dan sasaran renja serta memuat program dan kegiatan untuk satu tahun ke depan, berpedoman pada Rencana Strategis OPD. Dengan demikian Renja OPD pada dasarnya merupakan penjabaran dari dokumen RENSTRA OPD dan salah satu komponen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP).

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang tahun 2023-2026, Dinas Perhubungan Kota Singkawang telah menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) yang memuat visi dan misi Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang diikuti penyusunan sasaran dan kebijakannya, penyusunan program, kegiatan dan sub kegiatan serta indikator kinerja yang akan dicapai dalam kurun waktu tahun 2023-2026. Renstra tersebut dijabarkan dalam Renja Dinas Perhubungan Kota

Singkawang yang memuat rencana program dan kegiatan, serta kebutuhan dana/pagu indikatif yang direncanakan untuk dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2023 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu, meliputi evaluasi pencapaian target program dan kegiatan, analisis

kinerja pelayanan dinas, review rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, dan penelaahan kebijakan Nasional bidang perhubungan.

Penyusunan Renja Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2023 disamping usulan bidang teknis Perhubungan juga merupakan realisasi dari usulan aspirasi masyarakat melalui forum Musrenbang Kota Singkawang.

## **1.2 Landasan Hukum**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Singkawang disusun atas dasar landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tahapan, Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2028;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Singkawang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 51);
17. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022 - 2042;
18. Peraturan Wali kota Singkawang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan;
19. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026;
20. Peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Singkawang tahun 2023.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Singkawang disusun dengan maksud untuk dijadikan acuan dalam menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang memuat program dan kegiatan yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada RPJMD Kota Singkawang, RKPD Kota Singkawang Tahun 2023 dan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Singkawang adalah :

1. Sebagai acuan Dinas Perhubungan Kota Singkawang dalam rangka untuk terlaksananya RKPD Kota

Singkawang Tahun 2023 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Singkawang;

2. Untuk merumuskan rencana program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Singkawang serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal;
3. Sebagai arah dan acuan penyusunan RKA, DPA, dan LKT;
4. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
5. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antar unit kerja pada Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

#### **1.4 Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan Kota Singkawang ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

##### **BAB I. PENDAHULUAN**

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

##### **BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

- 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan
- 3.3 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023

### **BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN**

### **BAB V. PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022 dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan**

Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang tahun 2022, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari kegiatan yang dilaksanakan, serta capaian dari target program atau kegiatan Renstra Dinas Perhubungan, adapun tabel Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2022.

**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Dinas Perhubungan s/d tahun 2022 (tahun berjalan)  
Kota Singkawang**

Lembar : 01

Nama Perangkat Daerah : Dinas Perhubungan

Kode				Urusan/Bidang Urusan/Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020	Target Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2021			Target Program dan Kegiatan (Renja tahun 2022)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2022	
								Target Renja Dishub Tahun 2021	Realisasi Renja Dishub Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (2022)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Pelaksanaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		100%	95,03%	95,03%	100%	46,54%	46,54%
2	15	01.2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	100%	14 Dokumen		
2	15	01.2	01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penyusunan Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	3 Dokumen	50%

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	01.2	01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	15	01.2	01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	100%	7 Dokumen	4 Dokumen	57,14%
2	15	01.2	02	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>		<b>100%</b>	<b>88,99%</b>	<b>88,99%</b>	<b>100%</b>	<b>42,67%</b>	<b>42,67%</b>
2	15	01.2	02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS dan Penyediaan Gaji dan Tunjangan yang disediakan	100%		100%	90,21%	90,21%	100%	42,33%	42,33%
2	15	01.2	02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	100%		100%	84,13%	84,13%	100%	50,66%	50,66%
2	15	01.2	02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
2	15	01.2	02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Cakupan Pelaksanaan Pengelolaan dan Penyiapan Tanggapan Pemeriksaan	100%		100%	100%	100%	100%	17,04%	17,04%
2	15	01.2	03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>12 Dokumen</b>		<b>12 Dokumen</b>	<b>12 Dokumen</b>	100%	<b>8 Dokumen</b>	<b>4 Dokumen</b>	<b>50%</b>
2	15	01.2	03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Dokumen Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	8 Dokumen	4 Dokumen	50%

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	01.2	04	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	100%		100%	100%	100%	100%	50%	50%
2	15	01.2	04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	100%	12 Dokumen	6 Dokumen	50%
2	15	01.2	05	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	100%		100%	100%	100%	-	-	-
2	15	01.2	05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu yang diadakan; Jumlah Pakaian Korpri yang diadakan	145 setel; 80 Setel		9 setel	9 setel	9 setel	-	-	-
2	15	01.2	05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mendapatkan Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	7 Orang		7 Orang	7 Orang	7 Orang	-	-	-
2	15	01.2	06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	100%		100%	98,72%	98,72%	100%	35,14%	35,14%
2	15	01.2	06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	100%		100%	100%	100%	100%	49,53%	49,53%
2	15	01.2	06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan; Cakupan Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang disediakan	100%; 100%		100%	98,82%	98,82%	100%	24,36%	24,36%

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	01.2	06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%		100%	98,85%	98,85%	100%	11,66%	11,66%
2	15	01.2	06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100%		100%	97,50%	97,50%	100%	41,97%	41,97%
2	15	01.2	06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah yang dilaksanakan	100%		100%	98,50%	98,50%	100%	67,23%	67,23%
2	15	01.2	08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>200%</b>		<b>100%</b>	<b>97,04%</b>	<b>97,04%</b>	<b>100%</b>	<b>55,07%</b>	<b>55,07%</b>
2	15	01.2	08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	100%		100%	89,86%	89,86%	100%	-	-
2	15	01.2	08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	100%		100%	96,81%	96,81%	100%	55,90%	55,90%
2	15	01.2	08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan; Cakupan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang disediakan; Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan	100%; 100%; 100%		100%	98,07%	98,07%	100%	52,04%	52,04%

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	01.2	09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	200%		100%	99,27%	99,27%	100%	29,73%	29,73%
2	15	01.2	09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas/ Operasional yang dipelihara	1 Kendaraan		1 Kendaraan	1 Kendaraan	99,96%	1 Kendaraan	1 Kendaraan	100%
2	15	01.2	09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Cakupan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/ Operasional yang disediakan	41 Kendaraan		41 Kendaraan	41 Kendaraan	98,74%	41 Kendaraan	41 Kendaraan	100%
2	15	01.2	09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan Gedung Kantor yang direhabilitasi	100%		100%	99,82%	99,82%	100%	-	-
2	15	01.2	09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	100 Unit		100 Unit	100 Unit	99,65%	100 Unit	21 Unit	21%
2	15	01.2	13	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Cakupan Pelaksanaan Penataan Organisasi</b>	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	-	-	-
2	15	01.2	13.01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Tersusunnya Dokumen Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-	-
2	15	02		<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>	100%		100%	66,67%	66,67%	100%	66,67%	66,67%

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	02.2	01	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Tataran Transportasi Lokal Kota Singkawang</b>	100%		100%	100%	100%	100%	-	-
2	15	02.2	01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan (rencana induk/ master plan/ kajian)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	-	-
2	15	02.2	02	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota</b>	Panjang Jalan Kabupaten/ Kota yang dilengkapi Perlengkapan Jalan	442,6 km		442,6 km					
2	15	02.2	02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Jumlah Pengembangan/ Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum Lampu Hias dan Penerangan Taman Kota	1368 titik		1368 titik			1600 titik		
2	15	02.2	02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota	80%		80%			-	-	-
2	15	02.2	02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Penerangan Jalan Umum, Lampu Hias dan Penerangan Taman Kota yang dipelihara	562 titik		562 titik			597 titik		
2	15	02.2	02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Cakupan Perlengkapan Jalan yang dipelihara	70%		70%			-	-	-
2	15	02.2	04	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Persentase menurunnya v/c ratio rata-rata pada ruas jalan kota</b>	10%		10%	2,86%	2,86%			

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	02.2	04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
2	15	02.2	05	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Persentase Kendaraan bermotor yang laik jalan</b>	100%		100%	100%	100%	100%		
2	15	02.2	05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah paket pekerjaan pada kegiatan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	5 Paket		3 Paket	3 Paket	100%	-	-	-
2	15	02.2	05.02	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/ pelatihan/ seminar/ sertifikasi	2 Orang		1 Orang	3 Orang	100%	1 Orang	-	-
2	15	02.2	05.04	Penyediaan Buku Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase Tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%		100%	89,64%	89,64%	100%	-	-
2	15	02.2	05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang disediakan	15 Unit		15 Unit	16 Unit	106.66%	15 Unit	-	-
2	15	02.2	05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6 Kegiatan		-	-	-	4 Kegiatan	-	-

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	02.2	06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota</b>	<b>Persentase menurunnya v/c ratio rata-rata pada ruas jalan kota</b>	10%		10%	2,86%	2,86%			
2	15	02.2	06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/ Kota	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
2	15	02.2	06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/ Kota	Persentase Penurunan Pelanggaran Angkutan Umum di Jalan	20%		10%	16,22%	106,22%	10%		
2	15	02.2	07	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/ Kota</b>	Jumlah dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan kota dalam 1 tahun	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	100%	3 Dokumen	-	-
2	15	02.2	07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
2	15	02.2	09	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase Angkutan Umum Yang Memenuhi Standar	75%		75%	75%	100%	80%	75%	93,75%

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	02.2	09.01	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan / atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
2	15	02.2	09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/ atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%
2	15	03		<b>Program Pengelolaan Pelayaran</b>	Persentase Pelaksanaan Program Pelayaran	100%		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	15	03.2	02	<b>Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/ Kota</b>	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kota	100%		10%	8,74%	87,4%	10%		
2	15	03.2	02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Jumlah Bulan Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut kewenangan kabupaten/kota	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	6 Bulan	50%

1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
2	15	03.2	12	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>	Persentase Pemeliharaan Pelabuhan	100%		100%					
2	15	03.2	12.03	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Luas Pelabuhan yang dipelihara	64 m2		64 m2					
2	15	04		<b>Program Pengelolaan Penerbangan</b>	Persentase Pelaksanaan Program Penerbangan	100%		100%	85,56%	85,56%	100%	-	-
2	15	04.2	01	<b>Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter</b>	Persentase Fasilitas Bandara yang tersedia	7%		7%	6%	6%	7%	-	-
2	15	04.2	01.01	Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas dan Utilitas untuk Menunjang Kegiatan Bandar Udara; Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan di Sekitar Bandar Udara; Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Kebijakan Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan	1 Kegiatan; 2 Kegiatan; 3 Kegiatan		1 Kegiatan; 2 Kegiatan; 3 Kegiatan	6 Kegiatan	100%	1 Kegiatan; 2 Kegiatan; 3 Kegiatan	-	-

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam menganalisa kinerja yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan dilakukan melalui peninjauan kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu LKK tahun 2021.

Gambaran tentang capaian kinerja Dinas Perhubungan pada Renja disajikan pada tabel 2.2.

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Daerah Dinas Perhubungan  
Kota Singkawang**

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analis
				Tahun (Thn 2019)	Tahun (Thn 2020)	Tahun (thn 2021)	Tahun (thn 2022)	Tahun (thn 2020)	Tahun (thn 2021)	Tahun (thn 2022)	Tahun (thn 2023)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Angka Kecelakaan Lalu Lintas			27,5	25	22,5	20	11,02	6,69	20		
2	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana Transportasi			62,5%	65%	67,5%	70%	65%	65,24%	70%		
3	Persentase Tingkat Kelancaran Lalu Lintas			88%	86%	84%	82%	97,01%	100%	82%		
4	Persentase Ketersediaan Angkutan Umum Yang Sesuai Standar Manajemen Keselamatan Angkutan Umum			60%	70%	75%	80%	70%	75%	80%		

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Kota Singkawang mengemban berbagai fungsi sebagai pusat dari berbagai kegiatan seperti pusat pemerintahan, pariwisata, perdagangan dan pendidikan, hal ini sedikit banyak berpengaruh kepada pelayanan sistem transportasi di Kota Singkawang.

- 1) Perlunya pelaksanaan uji keur keliling untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam upaya peningkatan keselamatan jalan;
- 2) Peningkatan pelayanan Uji Keur yang disesuaikan dengan kemajuan teknologi salah satunya penerapan pembayaran layanan dengan non tunai;
- 3) Ketersediaan perlengkapan jalan yang masih kurang;
- 4) Menurunnya pelayanan angkutan penumpang umum akibat pandemi covid-19;
- 5) Angkutan umum yang melayani trayek dalam kota masih banyak yang belum menerapkan standar manajemen keselamatan;
- 6) Meningkatkan keselamatan dan disiplin berlalu lintas bagi pelajar, pengemudi/sopir angkutan umum dan masyarakat pengguna jalan lainnya;
- 7) Meningkatkan keselamatan dan disiplin berlalu lintas bagi para sopir angkutan umum;
- 8) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian disiplin pengguna jalan;
- 9) jumlah halte pada setiap jalur yang dilewati angkutan umum masih sangat kurang;
- 10) Maraknya pembangunan fasilitas/ gedung di tepi jalan yang belum dilakukan analisis dampak lalu lintas;
- 11) Perlunya perencanaan, penetapan kebijakan, norma-norma bidang perhubungan;
- 12) Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan pendataan (uji petik) prasarana dan fasilitas perhubungan;
- 13) Meningkatnya jumlah kendaraan dan banyaknya tempat - tempat yang menjadi bangkitan perjalanan, yang sudah pasti berdampak pada peningkatan volume lalu lintas;
- 14) Perlunya inovasi dan penyesuaian terhadap perkembangan teknologi terutama di bidang transportasi.

## 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

### Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2022 Kota Singkawang

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu indikator (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.)	Catatan Penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	DINAS PERHUBUNGAN				15.747.183.875	DINAS PERHUBUNGAN				12.464.457.720	
2.	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				10.422.130.487	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR				10.264.032.631	
3.	PERHUBUNGAN				5.325.053.388	PERHUBUNGAN				2.200.425.089	
1.	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	sekretari at			10.422.130.487	Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota	sekretaria t			10.264.032.631	
a.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	sekretaria at	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	47.076.449	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	sekretaria t	Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran , dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	42.733.300	
-	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	sekretaria t	Jumlah dokumen penyusunan Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan Perangkat Daerah	6 Dokumen	28.086.810	Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah	sekretariat	Jumlah dokumen penyusunan Renja, Renja Perubahan, RKA, RKA Perubahan, DPA, DPA Perubahan Perangkat Daerah	6 Dokumen	27.815.900	

-	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	sekretariat	Jumlah dokumen penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	6.057.093	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	sekretariat	Jumlah dokumen penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Dokumen	4.083.400	
-	Evaluasi kinerja perangkat daerah	sekretariat	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	12.932.546	Evaluasi kinerja perangkat daerah	sekretariat	Jumlah dokumen Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Dokumen	10.834.000	
<b>b</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>sekretariat</b>	<b>Persentase dokumen dan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>5.791.516.940</b>	<b>Administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>sekretariat</b>	<b>Persentase dokumen dan kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>5.662.540.355</b>	
-	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	sekretariat	Persentase Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan yang disediakan Kesehatan PNS dan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.520.182.067	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	sekretariat	Persentase Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan yang disediakan Kesehatan PNS dan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	5.451.673.755	
-	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	sekretariat	Cakupan Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	100%	253.800.000	Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	sekretariat	Cakupan Jasa Administrasi Keuangan yang disediakan	100%	193.920.000	
-	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	sekretariat	Jumlah dokumen penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	10.556.230	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	sekretariat	Jumlah dokumen penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1 Dokumen	10.587.000	

-	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	sekretariat	Cakupan pelaksanaan Pengelolaan Dan Penyiapan Tanggapan Pemeriksaan	100%	6.978.643	Pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan	sekretariat	Cakupan pelaksanaan Pengelolaan Dan Penyiapan Tanggapan Pemeriksaan	100%	6.359.600	
<b>c</b>	<b>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>sekretariat</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>7.262.043</b>	<b>Administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah</b>	<b>sekretariat</b>	<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>4.647.600</b>	
-	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	sekretariat	Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Dokumen	7.262.043	Penatausahaan barang milik daerah pada SKPD	sekretariat	Jumlah dokumen Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Dokumen	4.647.600	
<b>d</b>	<b>Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah</b>	<b>sekretariat</b>	<b>Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>7.000.885</b>	<b>Administrasi pendapatan daerah kewenangan perangkat daerah</b>	<b>sekretariat</b>	<b>Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>6.086.600</b>	
-	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	sekretariat	Jumlah dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	7.000.885	Pelaporan pengelolaan retribusi daerah	sekretariat	Jumlah dokumen Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen	6.086.600	
<b>e</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>sekretariat</b>	<b>Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>495.700.000</b>	<b>Administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>sekretariat</b>	<b>Persentase pelaksanaan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>283.181.750</b>	
-	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	sekretariat	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100%	18.300.000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	sekretariat	Cakupan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan	100%	7.666.500	

			Kantor yang disediakan					Kantor yang disediakan			
-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	sekretariat	Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan dan Cakupan Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang disediakan	100% dan 100%	150.000.000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	sekretariat	Cakupan Alat Tulis Kantor yang disediakan dan Cakupan Peralatan dan Kelengkapan Kantor yang disediakan	100% dan 100%	57.064.300	
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	sekretariat	Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	75.000.000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	sekretariat	Cakupan Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	100%	115.937.100	
-	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	sekretariat	Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100%	2.400.000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	sekretariat	Cakupan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang disediakan	100%	2.513.850	
-	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	sekretariat	Cakupan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	100%	250.000.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	sekretariat	Cakupan Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah yang dilaksanakan	100%	100.000.000	
<b>f</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>sekretariat</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.487.131.470</b>	<b>Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>sekretariat</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>3.799.787.786</b>	
-	Penyediaan jasa surat menyurat	sekretariat	Cakupan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	100%	3.400.000	Penyediaan jasa surat menyurat	sekretariat	Cakupan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	100%	866.000	
-	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	sekretariat	Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	2.805.484.392	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	sekretariat	Cakupan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%	2.991.021.886	

			yang disediakan					yang disediakan			
-	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	sekretariat	Cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan, Cakupan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang disediakan dan Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan	100%, 100% 100%	678.247.078	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	sekretariat	Cakupan Jasa Kebersihan Kantor yang disediakan, Cakupan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja yang disediakan dan Cakupan Makanan dan Minuman yang disediakan	100%, 100% 100%	807.899.900	
<b>g</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>sekretariat</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>586.442.700</b>	<b>Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	<b>sekretariat</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>465.055.240</b>	
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	sekretariat	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	1 Kendaraan	26.612.400	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	sekretariat	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang dipelihara	1 Kendaraan	9.991.600	
-	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	sekretariat	Cakupan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	41 Kendaraan	300.000.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	sekretariat	Cakupan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional yang disediakan	41 Kendaraan	238.264.140	

-	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	sekretariat	Cakupan Gedung Kantor yang direhabilitasi	100%	200.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya	sekretariat	Cakupan Gedung Kantor yang direhabilitasi	100%	174.299.500	
-	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	sekretariat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	100 Unit	59.830.300	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	sekretariat	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara	100 Unit	42.500.000	
<b>2</b>	<b>Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)</b>	<b>Bidang LL, Angkutan PPT dan UPT. PKB</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>	<b>100%</b>	<b>4.840.053.388</b>	<b>Program penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)</b>	<b>Bidang LL, Angkutan PPT dan UPT. PKB</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>	<b>100%</b>	<b>2.031.450.589</b>	
<b>a</b>	<b>Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota</b>	<b>Bidang PPT</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Tataran Transportasi Lokal Kota Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000</b>	<b>Penetapan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota</b>	<b>Bidang PPT</b>	<b>Persentase Ketersediaan Dokumen Tataran Transportasi Lokal Kota Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>104.065.000</b>	
-	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	Bidang PPT	Jumlah Dokumen Perencanaan (Rencana Induk/Master Plan/Kajian)	1 Dokumen	250.000.000	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ kabupaten/kota	Bidang PPT	Jumlah Dokumen Perencanaan (Rencana Induk/Master Plan/Kajian)	1 Dokumen	104.065.000	
<b>b</b>	<b>Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota</b>	<b>Bidang PPT</b>	<b>Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>70%</b>	<b>2.700.000.000</b>	<b>Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota</b>	<b>Bidang PPT</b>	<b>Persentase Ketersediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>70%</b>	<b>1.084.995.889</b>	

-	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	Bidang PPT	Jumlah Pengembangan /Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum, Lampu Hias dan Penerangan Taman Kota	1368 Titik	1.500.000.000	Pembangunan prasarana jalan di jalan kabupaten/kota	Bidang PPT	Jumlah Pengembangan /Peningkatan Fasilitas Penerangan Jalan Umum, Lampu Hias dan Penerangan Taman Kota	1368 Titik	784.998.089	
-	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Bidang TPPT	Jumlah Prasarana Penerangan Jalan Umum, Lampu Hias dan Penerangan Taman Kota yang dipelihara	562 Titik	750.000.000	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana jalan	Bidang PPT	Jumlah Prasarana Penerangan Jalan Umum, Lampu Hias dan Penerangan Taman Kota yang dipelihara	562 Titik	299.997.800	
<b>c</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Bidang Angkutan</b>			<b>365.000.000</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>	<b>Bidang Angkutan</b>			<b>7.800.000</b>	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Bidang Angkutan			365.000.000	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	Bidang Angkutan			7.800.000	
<b>d</b>	<b>Penribitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</b>	<b>Bidang Angkutan</b>	<b>Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah Parkir Tepi Jalan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>300.000.000</b>	<b>Penribitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir</b>	<b>Bidang Angkutan</b>	<b>Persentase Capaian Pendapatan Asli Daerah Parkir Tepi Jalan Umum</b>	<b>100%</b>	<b>123.650.000</b>	
-	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Bidang Angkutan	Jumlah Bulan Pengawasan yang dilaksanakan	12 Bulan	300.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan kabupaten/kota	Bidang Angkutan	Jumlah Bulan Pengawasan yang dilaksanakan	12 Bulan	123.650.000	

e	Pengujian berkala kendaraan bermotor	UPT. PKB	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	100%	482.760.888	Pengujian berkala kendaraan bermotor	UPT. PKB	Persentase Kendaraan Bermotor Laik Jalan	100%	245.839700	
-	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	UPT. PKB	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan dan Jumlah Sarana Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor yang diadakan	1 Dokumen dan 2 Unit	200.000.000	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	UPT. PKB	Jumlah Dokumen Perencanaan yang dilaksanakan dan Jumlah Sarana Penunjang Pengujian Kendaraan Bermotor yang diadakan	1 Dokumen dan 2 Unit	23.975.000	
-	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	UPT. PKB	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan/seminar/sertifikasi	1 Orang	107.760.888	Peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengujian berkala kendaraan bermotor	UPT. PKB	Jumlah ASN yang mengikuti diklat/pelatihan/seminar/sertifikasi	1 Orang	93.592.800	
-	Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	UPT. PKB	Persentase tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	20.000.000	Penyediaan bukti lulus uji pengujian berkala kendaraan bermotor	UPT. PKB	Persentase tersedianya Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	100%	12.339.900	
-	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	UPT. PKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	15 Unit	100.000.000	Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian berkala kendaraan bermotor	UPT. PKB	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang dipelihara	15 Unit	105.980.000	
-	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	UPT. PKB	Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6 Kegiatan	25.000.000	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor	UPT. PKB	Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	6 Kegiatan	9.952.000	

<b>f</b>	<b>Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota</b>	<b>Bidang LL</b>	<b>Persentase menurunnya v/c ratio rata-rata pada ruas jalan kota</b>	<b>5%</b>	<b>592.292.500</b>	<b>Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota</b>	<b>Bidang LL</b>	<b>Persentase menurunnya v/c ratio rata-rata pada ruas jalan kota</b>	<b>5%</b>	<b>311.654.000</b>	
-	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Bidang LL	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	12 Bulan	50.000.000	Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota	Bidang LL	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	12 Bulan	42.942.000	
-	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bidang LL			200.000.000	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Bidang LL			91.903.000	
-	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Bidang LL	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian	12 Bulan	342.292.500	Pengawasan dan pengendalian efektivitas pelaksanaan kebijakan untuk jalan kabupaten/kota	Bidang LL	Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian	12 Bulan	176.809.000	
<b>g</b>	<b>Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten/kota</b>	<b>Bidang LL</b>	<b>Jumlah dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan kota dalam 1 tahun</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk jalan kabupaten/kota</b>	<b>Bidang LL</b>	<b>Jumlah dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk jalan kota dalam 1 tahun</b>	<b>3 Dokumen</b>	<b>65.100.000</b>	
-	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Bidang LL	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Bulan	50.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi penilaian hasil andalalin	Bidang LL	Jumlah Bulan Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Bulan	65.100.000	
<b>g</b>	<b>Audit dan Inspeksi</b>	<b>Bidang LL</b>			<b>50.000.000</b>	<b>Audit dan Inspeksi</b>	<b>Bidang LL</b>			<b>23.185.000</b>	

	<b>Keselamatan LLAJ di Jalan</b>					<b>Keselamatan LLAJ di Jalan</b>					
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Bidang LL			<b>50.000.000</b>	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Bidang LL			23.185.000	
<b>h</b>	<b>Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>Bidang Angkutan</b>	<b>Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar</b>	<b>60%</b>	<b>50.000.000</b>	<b>Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota</b>	<b>Bidang Angkutan</b>	<b>Persentase Angkutan Umum yang Memenuhi Standar</b>	<b>60%</b>	<b>65.161.000</b>	
-	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Bidang Angkutan	Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	50.000.000	Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota	Bidang Angkutan	Cakupan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12 Bulan	8.791.000	
-	Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Bidang Angkutan	Pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu)	12 Bulan		Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) kabupaten/kota	Bidang Angkutan	Pelaksanaan Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu)	12 Bulan	56.370.000	

			kabupaten/kota					kabupaten/kota			
3	Program pengelolaan pelayaran	Bidang Angkutan	Persentase Pelaksanaan Program Pelayaran	100%	85.000.000	Program pengelolaan pelayaran	Bidang Angkutan	Persentase Pelaksanaan Program Pelayaran	100%	24.374.500	
a	Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas Pelabuhan dalam daerah kabupaten/kota	Bidang Angkutan	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kota	74%	85.000.000	Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas Pelabuhan dalam daerah kabupaten/kota	Bidang Angkutan	Persentase Peningkatan Layanan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kota	74%	24.374.500	
-	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten/kota	Bidang Angkutan	Cakupan Pengawasan Terhadap Alat Keselamatan Pelayaran	6 Kali	85.000.000	Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat kewenangan kabupaten/kota	Bidang Angkutan	Cakupan Pengawasan Terhadap Alat Keselamatan Pelayaran	6 Kali	24.374.500	
4	Program pengelolaan penerbangan	Bidang PPT	Persentase Pelaksanaan Program Penerbangan	7%	350.000.000	Program pengelolaan penerbangan	Bidang PPT	Persentase Pelaksanaan Program Penerbangan	7%	144.600.000	
a	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter	Bidang PPT	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Penerbangan	7%	350.000.000	Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter	Bidang PPT	Persentase Pelaksanaan Program Pengelolaan Penerbangan	7%	144.600.000	
-	Fasilitasi penerbitan izin mendirikan tempat tinggal landas dan mendarat helikopter	Bidang PPT	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas	1 Kegiatan 2 Kegiatan dan 3 Kegiatan	350.000.000	Fasilitasi penerbitan izin mendirikan tempat tinggal landas dan mendarat helikopter	Bidang PPT	Jumlah kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Penyediaan Aksesibilitas	1 Kegiatan 2 Kegiatan dan 3 Kegiatan	144.600.000	

			dan Utilitas untuk Menunjang Kegiatan Bandar Udara, Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Sekitar Bandar Udara, dan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Kebijakan Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan					dan Utilitas untuk Menunjang Kegiatan Bandar Udara, Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Rinci Tata Ruang Kawasan Sekitar Bandar Udara, dan Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Penetapan Kebijakan Sarana, dan Prasarana Penyelenggaraan Kebandarudaraan			
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa banyak perbedaan dari nilai pagu anggarannya. Hal tersebut disebabkan oleh adanya rasionalisasi anggaran akibat pandemi covid-19 yang menyebabkan berkurangnya nilai pagu anggaran dan ditundanya beberapa kegiatan.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelaahan untuk program dan kegiatan masyarakat maka kebijakan penyelenggaraan perhubungan sebagai berikut :

1. Mempertahankan tingkat jasa pelayanan sarana dan prasarana perhubungan;
2. Melaksanakan konsolidasi melalui restrukturisasi dan reformasi di bidang sarana dan prasarana perhubungan;
3. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal dan memberi nilai tambah.

Selanjutnya hal - hal yang perlu dilakukan sinergitas antara pusat dan daerah berupa dukungan lahan atau sinergi perencanaan teknis maupun pelaksanaan yaitu sebagai berikut :

1. Pembangunan & pengelolaan, prasarana, sarana & fasilitas LLAJ dengan terimplementasinya teknologi lalu lintas angkutan jalan & manajemen rekayasa lalu lintas;
2. Terpasangnya fasilitas keselamatan LLAJ, dan terbangunnya simpul transportasi berupa bandar udara/ Pelabuhan laut dan ASDP/Terminal Angkutan Darat yang memenuhi standar;
3. Pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan;
4. Peningkatan keselamatan transportasi darat dengan terselenggaranya kegiatan manajemen keselamatan transportasi (sosialisasi, penyusunan pedoman teknis keselamatan transportasi, peningkatan fasilitas keselamatan transportasi).

Tabel Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2023

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN

## **BAB III**

# **TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH**

### **3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi. Pengembangan sistem angkutan umum dan pergerakan angkutan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarki fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkungan dan tata ruang.

Sedangkan program prioritas pembangunan nasional perhubungan darat, yaitu program pembinaan, pengembangan dan pembangunan transportasi perkotaan dengan terciptanya rencana induk angkutan perkotaan, rencana induk sistem informasi lalu lintas perkotaan, penyelenggaraan manajemen dan rekayasa di jalan nasional pada kawasan perkotaan, dan fasilitas konversi BBM serta program grafisifikasi angkutan umum perkotaan.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan Kota Singkawang**

Adapun rumusan tujuan dan sasaran dari penyusunan Renja ini sesuai dengan Renstra Dinas Perhubungan Kota Singkawang Tahun 2023-2024 adalah sebagai berikut :

1. Tujuan:
  - a. Terwujudnya aparatur perhubungan yang kompeten dan profesional;
  - b. Tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang cukup secara kualitas dan kuantitas;
  - c. Terwujudnya keterpaduan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, ketertiban, keterjangkauan penyelenggaraan pelayanan perhubungan;
  - d. Terwujudnya kemitraan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pelayanan perhubungan.
2. Sasaran Jangka Menengah:
  - a. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur perhubungan yang berkompeten dan profesional;
  - b. Terpenuhinya infrastruktur transportasi strategis dan fasilitas pendukungnya;
  - c. Meningkatnya pemenuhan standarisasi penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi;
  - d. Meningkatnya Manajemen Sektor Perhubungan yang bersih, transparan, efektif dan efisien;
  - e. Meningkatnya pelayanan publik dan penyelenggaraan perhubungan yang terpadu, selamat, aman, nyaman, tertib, lancar dan terjangkau;

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Singkawang sebagai wujud pengimplementasian strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran. Penyusunan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Singkawang berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2020.

Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan yang dilaksanakan merupakan penjabaran dari strategi dan kebijakan, adapun program dan kegiatan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan :

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

a) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

b) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD;

c) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;

d) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;

e) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD;

f) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD;

g) Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
  - b) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN;
  - c) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD;
  - d) Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan.
- c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan :
- a) Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD;
  - b) Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD;
  - c) Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD.
- d. Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan :
- a) Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah;
  - b) Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah.
- e. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- Sub Kegiatan :
- a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
  - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
  - c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
  - d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
  - e) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;  
Sub Kegiatan :
    - a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
    - b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
    - c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
  - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;  
Sub Kegiatan :
    - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
    - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
    - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
    - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ):
- Kegiatan :
- a. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;  
Sub Kegiatan :
    - a) Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;
    - b) Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota;

- c) Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota.
- b. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;  
Sub Kegiatan :
  - a) Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
  - b) Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota;
  - c) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan;
  - d) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan.
- c. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C  
Sub Kegiatan :
  - a) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung);
  - b) Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C
- d. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir.  
Sub Kegiatan :
  - a) Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  - b) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota.

e. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;

Sub Kegiatan :

- a) Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - b) Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - c) Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
  - d) Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - e) Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - f) Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji;
  - g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - h) Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - i) Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
  - j) Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- f. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan :
- a) Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota;

- b) Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
  - c) Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota ;
  - d) Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota;
  - e) Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota.
- g. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota;
- Sub Kegiatan :
- a) Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin.
- h. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan;
- Sub Kegiatan :
- a) Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ;
  - b) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/ Kota;
  - c) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota;
  - d) Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum.

- i. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota;  
Sub Kegiatan :
  - a) Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota.
- j. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;  
Sub Kegiatan :
  - a) Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota.
- k. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota;  
Sub Kegiatan :
  - b) Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

3. Program Pengelolaan Pelayaran.

Kegiatan :

- a. Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota;

Sub Kegiatan :

- a) Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota.
- b. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Sub Kegiatan :

- a) Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal.

4. Program Pengelolaan Penerbangan.

Kegiatan :

- a. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter;

Sub Kegiatan :

- a) Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter.

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN

#### 4.1 Rencana Kerja Dinas Perhubungan

KODE	URUSAN/ PROGRAM/ KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			RENCANA TAHUN 2023			PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024			
		CAPAIAN PROGRAM	HASIL KEGIATAN	KELUARAN SUB KEGIATAN	LOKASI	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA	TARGET CAPAIAN KINERJA	KEBUTUHAN DANA/ PAGU INDIKATIF (Rp.)	SUMBER DANA
1	2	3			4	5	6	7			
	DINAS PERHUBUNGAN				Singkaw ang		22.194.463.131,00	APBD DAN PAD		27.020.100.000,00	
2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				Singkaw ang		11.842.200.000,00	APBD DAN PAD		11.842.200.000,00	
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN				Singkaw ang		10.352.263.131,00	APBD		15.177.900.000,00	APBD
2.15.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase pelaksanaa n program penyelengg araan urusan			Singkaw ang	100%	11.842.200.000,00	APBD	100%	11.842.200.000,00	APBD

	KABUPATEN/KOTA	pemerintahan umum									
2.15.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Singkawang	100%	57.000.000,00	APBD	100%	57.000.000,00	APBD
2.15.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Singkawang	3 Dokumen	8.000.000,00	APBD	3 Dokumen	8.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Singkawang	1 Dokumen	7.000.000,00	APBD	1 Dokumen	7.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Singkawang	1 Dokumen	7.000.000,00	APBD	1 Dokumen	7.000.000,00	APBD
	Koordinasi dan			Jumlah Dokumen DPA-SKPD	Singkawang	1 Dokumen	7.000.000,00	APBD	1 Dokumen	7.000.000,00	APBD

	Penyusunan DPA-SKPD			dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD							
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Singkawang	1 Dokumen	7.000.000,00	APBD	1 Dokumen	7.000.000,00	APBD
2.15.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Singkawang	1 Laporan	11.000.000,00	APBD	1 Laporan	11.000.000,00	APBD
2.15.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Singkawang	5 Laporan	10.000.000,00	APBD	5 Laporan	10.000.000,00	APBD
<b>2.15.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>6.219.000.000,00</b>	<b>APBD DAN PAD</b>	<b>100%</b>	<b>6.219.000.000,00</b>	<b>APBD DAN PAD</b>
2.15.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan			Persentase Penyediaan Gaji dan	Singkawang	69 Orang/bulan	6.000.000.000,00	APBD DAN PAD	69 Orang/bulan	6.000.000.000,00	APBD DAN PAD

	Tunjangan ASN			Tunjangan ASN							
2.15.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			Persentase Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Singkawang	12 Dokumen	200.000.000,00	APBD	12 Dokumen	200.000.000,00	APBD
2.15.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			Persentase Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Singkawang	1 Laporan	11.000.000,00	APBD	1 Laporan	11.000.000,00	APBD
2.15.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan			Persentase Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Singkawang	6 Dokumen	8.000.000,00	APBD	6 Dokumen	8.000.000,00	APBD
<b>2.15.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>22.300.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>22.300.000,00</b>	<b>APBD</b>
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Singkawang	2 Dokumen	10.000.000,00	APBD	2 Dokumen	10.000.000,00	APBD
	Rekonsiliasi dan Penyusunan			Jumlah Laporan Rekonsiliasi	Singkawang	12 Laporan	11.500.000,00	APBD	12 Laporan	11.500.000,00	APBD

	Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD			dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD							
2.15.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Singkawang	2 Laporan	800.000,00	APBD	2 Laporan	800.000,00	APBD
<b>2.15.01.2.04</b>	<b>Administrasi Pendapatan Daerah Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>		<b>Singkawang</b>	<b>100%.</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100%.</b>	<b>18.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Singkawang	3 Dokumen	10.000.000,00	APBD	3 Dokumen	10.000.000,00	APBD
2.15.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Singkawang	12 Laporan	8.000.000,00	APBD	12 Laporan	8.000.000,00	APBD
<b>2.15.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Cakupan Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>585.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>585.000.000,00</b>	<b>APBD</b>

2.15.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Singkawang	1 Paket	12.000.000,00	APBD	1 Paket	12.000.000,00	APBD
2.15.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Singkawang	1 Paket	120.000.000,00	APBD	1 Paket	120.000.000,00	APBD
2.15.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Singkawang	1 Paket	150.000.000,00	APBD	1 Paket	150.000.000,00	APBD
2.15.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Singkawang	12 Dokumen	3.000.000,00	APBD	12 Dokumen	3.000.000,00	APBD
2.15.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Luar Singkawang	200 Laporan	300.000.000,00	APBD	200 Laporan	300.000.000,00	APBD

2.15.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Singkawang	100%	5.500.900.000,00	APBD	100%	5.500.900.000,00	APBD
2.15.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Singkawang	1 Laporan	900.000,00	APBD	1 Laporan	900.000,00	APBD
2.15.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Singkawang	1 Laporan	3.600.000.000,00	APBD	1 Laporan	3.600.000.000,00	APBD
2.15.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Singkawang	1 Laporan	900.000.000,00	APBD	1 Laporan	900.000.000,00	APBD
2.15.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik		Singkawang	100%	440.000.000,00	APBD	100%	440.000.000,00	APBD

			<b>Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>								
2.15.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Singkawang	1 Unit	40.000.000,00	APBD	1 Unit	40.000.000,00	APBD
2.15.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Singkawang	44 Unit	300.000.000,00	APBD	44 Unit	300.000.000,00	APBD
2.15.01.2.09.09	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Singkawang	150 Unit	70.000.000,00	APBD	150 Unit	70.000.000,00	APBD
2.15.01.2.09.10	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	Singkawang	2 Unit	30.000.000,00	APBD	2 Unit	30.000.000,00	APBD

				Dipelihara/D irehabilitasi							
<b>2.15.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGAR AAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>	<b>Persentase Pelaksanaa n Program Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>			<b>Singkaw ang</b>	<b>100%</b>	<b>8.956.500.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>14.582.900.000,00</b>	<b>APBD</b>
<b>2.15.02.2.01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah dokumen perencana an yang tersedia</b>		<b>Singkaw ang</b>	<b>2 dokumen</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>410.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
2.15.02.2.01.01	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Ko ta			Jumlah dokumen perencanaan (rencana induk/maste r plan/kajian)	Singkaw ang	2 dokumen	200.000.000,00	APBD	1 Dokumen	250.000.000,00	APBD
	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Ko ta			Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/ Kota	Singkawa ng	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD	1 Dokumen	100.000.000,00	APBD
	Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Ko ta			Jumlah Laporan Pengendalian Rencana Induk Jaringan LLAJ	Singkawa ng	4 Laporan	60.000.000,00	APBD	4 Laporan	60.000.000,00	APBD

				Kabupaten/ Kota							
<b>2.15.02.2.02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten /Kota</b>		<b>Singkawang</b>	<b>80%</b>	<b>6.056.763.149,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>8.998.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
2.15.02.2.02.01	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			Jumlah Paket Pelaksanaan Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Terbangun	Singkawang	4 Paket	3.108.487.146,00	APBD	5 Paket	5.500.000.000	APBD
2.15.02.2.02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota			Jumlah Paket Pelaksanaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/ Kota yang Tersedia	Singkawang	3 Paket	450.275.985,00	APBD	3 Paket	675.000.000	APBD
2.15.02.2.02.03	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan			Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	Singkawang	1292 Unit	2.238.000.000,00	APBD	1492 Unit	2.538.000.000	APBD
2.15.02.2.02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan			Jumlah Paket Pelaksanaan Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi	Singkawang	2 Paket	260.000.000,00	APBD	2 Paket	285.000.000	APBD

				i dan Terpelihara							
<b>2.15.02.2.03</b>	<b>Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C</b>		<b>Persentase Ketersediaan Fasilitas Terminal Penumpang Tipe C</b>		<b>Singkawang</b>	<b>60%</b>	<b>265.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>70%</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
2.15.02.2.03.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)			Jumlah Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung) yang dipelihara	Singkawang	2 Unit	250.000.000,00	APBD	2 Unit	315.000.000,00	APBD
	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C			Jumlah SDM Pengelola Terminal Tipe C yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Singkawang	1 Orang	15.000.000,00	APBD	1 Orang	15.000.000,00	APBD
<b>2.15.02.2.04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>		<b>Persentase capaian pendapatan asli daerah melalui retribusi parkir</b>		<b>Singkawang</b>	<b>25%</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>50%</b>	<b>550.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas			Jumlah Paket Pelaksanaan Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin	Singkawang	1 Paket	350.000.000,00	APBD	1 Paket	500.000.000,00	APBD

	Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik							
2.15.02.2.04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Singkawang	12 Laporan	200.000.000,00	APBD	12 Laporan	250.000.000,00	APBD
2.15.02.2.05	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>		<b>Persentase Kendaraan bermotor yang laik jalan</b>		<b>Singkawang</b>	<b>80%</b>	<b>1.245.500.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>85%</b>	<b>1.979.900.000,00</b>	<b>APBD</b>
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala			Jumlah Paket Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan	Singkawang	1 Paket	800.000.000,00	APBD	1 Paket	1.500.000.000,00	APBD

	Kendaraan Bermotor			Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia							
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Singkawang	9 Orang	30.000.000,00	APBD	9 Orang	30.900.000,00	APBD
	Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor			Jumlah Laporan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang Terdaftar	Singkawang	12 Laporan	15.000.000,00	APBD	12 Laporan	15.500.000,00	APBD
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Jumlah Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Singkawang	3500 Unit	167.500.000,00	APBD	3500 Unit	172.500.000,00	APBD
	Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala			Jumlah Laporan Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian	Singkawang	6 Laporan	16.000.000,00	APBD	6 Laporan	20.000.000,00	APBD

	Kendaraan Bermotor			Berkala Kendaraan Bermotor							
	Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji			Jumlah Laporan Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji	Singkawang	12 Laporan	20.000.000,00	APBD	12 Laporan	20.500.000,00	APBD
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	Singkawang	11 Unit	150.000.000,00	APBD	11 Unit	163.500.000,00	APBD
	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Singkawang	6 Laporan	25.000.000,00	APBD	6 Laporan	27.500.000,00	APBD
	Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Jumlah Dokumen Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Singkawang	1 Dokumen	8.500.000,00	APBD	1 Dokumen	11.500.000,00	APBD

	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Singkawang	6 Laporan	13.500.000,00	APBD	6 Laporan	18.000.000,00	APBD
<b>2.15.02.2.06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase penurunan v/c ratio rata-rata pada ruas jalan kota</b>		<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>1.065.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>1.260.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
2.15.02.2.06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Singkawang	12 Laporan	150.000.000	APBD	12 Laporan	180.000.000	APBD
2.15.02.2.06.02	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas			Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen	Singkawang	150 Unit	300.000.000	APBD	150 Unit	450.000.000	APBD

				dan Rekayasa Lalu Lintas							
	Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pelaksanaan Uji Coba dan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Singkawang	12 Laporan	40.000.000	APBD	12 Laporan	55.000.000	APBD
2.15.02.2.06.04	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Singkawang	12 Laporan	525.000.000	APBD	12 Laporan	525.000.000	APBD
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan	Singkawang	4 Laporan	50.000.000	APBD	4 Laporan	50.000.000	APBD

				Kabupaten/ Kota							
<b>2.15.02.2.07</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>115.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
2.15.02.2.07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Singkawang	6 Laporan	35.000.000,00	APBD	6 Laporan	45.000.000,00	APBD
	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	Singkawang	12 Laporan	55.000.000,00	APBD	12 Laporan	70.000.000,00	APBD
<b>2.15.02.2.08</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan LLAJ</b>		<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>145.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>240.000.000,00</b>	<b>APBD</b>

	Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektur LLAJ			Jumlah Inspektur Keselamatan LLAJ yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Singkawang	1 Orang	15.000.000,00	APBD	2 Orang	30.000.000,00	APBD
2.15.02.2.08.04	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Singkawang	2 Laporan	50.000.000,00	APBD	2 Laporan	50.000.000,00	APBD
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Singkawang	12 Laporan	50.000.000,00	APBD	12 Laporan	100.000.000,00	APBD
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan	Singkawang	2 Laporan	30.000.000,00	APBD	2 Laporan	60.000.000,00	APBD

				Angkutan Umum							
<b>2.15.02.2.09</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pelayanan Angkutan Penumpang Umum</b>		<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Singkawang	12 Laporan	150.000.000,00	APBD	12 Laporan	250.000.000,00	APBD
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Pelayanan Angkutan Penumpang Umum</b>		<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>120.000.000,00</b>	<b>APBD</b>

	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Singkawang	12 Laporan	60.000.000,00	APBD	12 Laporan	120.000.000,00	APBD
	<b>Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Persentase Ketersediaan Dokumen/SK Penetapan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Penumpang Umum</b>		<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>30.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
	Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Dokumen Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah	Singkawang	12 Laporan	20.000.000,00	APBD	-	-	-

				Kabupaten/ Kota							
	Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	1 Dokumen	30.000.000,00	APBD
<b>2.15.03</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Program Pelayaran</b>			<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>150.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan		<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>APBD</b>

			<b>dalam Daerah Kabupaten /Kota</b>								
	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Penyeberangan dan Disetujuinya Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Singkawang	12 Laporan	75.000.000,00	APBD	12 Laporan	200.000.000,00	APBD
<b>2.15.03.2.12</b>	<b>Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>		<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Pelabuhan Pengumpan Lokal</b>		<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>75.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>200.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
2.15.03.2.12.03	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Singkawang	6 Laporan	75.000.000,00	APBD	6 Laporan	200.000.000,00	APBD

2.15.04	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENERBANGAN</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Program Penerbangan</b>			<b>Singkawang</b>	<b>100%</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
2.15.04.2.01	<b>Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter</b>		<b>Persentase Ketersediaan Bandar Udara</b>		<b>Singkawang</b>	<b>50%</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>APBD</b>	<b>100%</b>	<b>195.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
2.15.04.2.01.01	Fasilitasi Penerbitan Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter			Jumlah Dokumen Izin Mendirikan Tempat Tinggal Landas dan Mendarat Helikopter yang Diterbitkan; Jumlah Fasilitas Bandar Udara yang Tersedia; Jumlah Bandar Udara yang Terkelola	Singkawang	1 Dokumen; 2 Unit; 2 Unit	195.000.000,00	APBD	1 Dokumen; 2 Unit; 2 Unit	195.000.000,00	APBD

Dari tabel tersebut telah tertuang jumlah pagu yang direncanakan pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp.22.194.463.131,00 dan perkiraan maju pada tahun anggaran 2023 sebesar Rp. 27.020.100.000,00. Diharapkan anggaran yang telah direncanakan dapat terakomodir pada dokumen pelaksanaan anggaran tahun 2023 agar kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana.

Terdapat kendala pada program pengelolaan penerbangan yaitu kegiatan penyediaan sarana dan prasarana serta pengelolaan transportasi beserta sub kegiatan penyediaan sarana dan prasarana bandara/lapangan udara dan sub kegiatan pengelolaan bandara/lapangan udara tidak muncul dalam SIPD sehingga dalam upaya antisipasi pada rencana kegiatan didalamnya kami masukkan kedalam kegiatan penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helicopter pada sub kegiatan fasilitasi penerbitan izin mendirikan tempat tinggal landas dan mendarat helicopter.

#### **4.2 Pendanaan Dinas Perhubungan**

Guna merealisasikan semua program dan kegiatan yang direncanakan diperlukan dana yang cukup besar. Untuk itu secara bertahap program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dilaksanakan setiap tahun. Adapun sumber pendanaan dimaksud berasal dari:

1. APBD Kota Singkawang;
2. Pendapatan Asli Daerah Kota Singkawang;
3. APBD Propinsi Kalimantan Barat;
4. APBN, dan;
5. Bantuan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku (hibah, pinjaman,dll

# BAB V

## PENUTUP

### 5.1. Inovasi Perangkat Daerah

Dalam rangka optimalisasi dan pengembangan kinerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang, maka dibutuhkan suatu inovasi yang dapat bermanfaat bagi masyarakat maupun pemerintah. Adapun inovasi - inovasi yang telah dilaksanakan antara lain :

NO	INOVASI	SUB KEGIATAN	KETERANGAN
1	DILAN (Digitalisasi Perlengkapan Jalan)	-	Kaitan dengan pendanaan saat ini hanya pada kegiatan survey kebutuhan, pengadaan, dan rehabilitasi, sedangkan digitalisasi untuk sementara menggunakan fasilitas pada salah satu website kedepannya dibutuhkan pendanaan terkait pembuatan aplikasi yang lebih baik.

2	BELUD (Buku Saku Edukasi Lalu Lintas Usia Dini)	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	
3	SIM PKB (Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor)	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Yang sudah berjalan saat ini masih merupakan tahapan awal dimana masih diperlukan pengembangan.
4	DISEK LALU (Digitalisasi Sistem Edukasi Keselamatan Lalu Lintas)	-	Inovasi ini tidak menggunakan anggaran karena hanya berbentuk edukasi digital pada medsos, namun tidak menutup kemungkinan kedepannya akan dikembangkan dalam bentuk video, dimana dalam pembuatan video tersebut membutuhkan dukungan pendanaan.
5	DIGISPOT (Digitalisasi Inventaris Black Spot)	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan	Kaitan dengan pendanaan saat ini hanya pada kegiatan survey, sedangkan digitalisasi untuk

		Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	sementara menggunakan fasilitas pada salah satu website kedepannya dibutuhkan pendanaan terkait pembuatan aplikasi yang lebih baik.
6	Smart SL (Smart Street Lightning)		Aplikasi yang digunakan saat ini merupakan fasilitas yang diberikan salah satu vendor sebagai timbal balik karena telah menggunakan produk vendor tersebut. Namun untuk kendali masih dipegang oleh vendor tersebut, oleh karena itu sangat dibutuhkan aplikasi yang dapat dikendalikan secara utuh oleh pemerintah kota singkawang melalui dinas perhubungan, sehingga dibutuhkan pendanaan untuk mewujudkannya.

## **5.2. Penutup**

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang yang didalamnya mencakup penjabaran Program dan Kegiatan Dinas yang disusun secara tahunan ini agar dapat dipakai pedoman atau acuan dalam mencapai tujuan pembangunan di bidang Perhubungan.

Rencana Kerja ini akan terlaksana apabila mendapat perhatian semua pihak dan tersedianya anggaran. Apabila terdapat program atau kegiatan yang belum mendapatkan anggaran pada tahun ini, maka tahun selanjutnya untuk dijadikan prioritas dalam hal penganggarannya. Hal ini dikarenakan akan berdampak pada pencapaian kinerja Pemerintah Kota Singkawang.

Optimalisasi dalam pelaksanaan Rencana Kerja merupakan hal penting yang perlu diupayakan dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan sesuai dengan kewenangan yang diemban oleh Dinas Perhubungan Kota Singkawang.

Adanya Rencana Kerja ini diharapkan agar Dinas Perhubungan Kota Singkawang serta seluruh aparat dapat melaksanakan tugas secara terarah, bertahap dan berkesinambungan dengan tetap mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dan untuk mengantisipasi tuntutan masyarakat akan pelayanan yang bersifat cepat, akurat, transparan dan adil.

Keberhasilan program - program pembangunan ini akan sangat bergantung pada komitmen pimpinan beserta jajarannya serta didukung dengan etos kerja yang tinggi dibarengi dengan disiplin ilmu sesuai dengan tugas yang diemban dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Selanjutnya kami menyadari bahwa Rencana Kerja yang kami susun ini jauh dari sempurna, maka kami dengan segala kerendahan hati mengharapkan koreksi dan pengayaan materi dari berbagai pihak untuk

penyempurnaan perencanaan dimasa-masa yang akan datang. Semoga Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 Dinas Perhubungan Kota Singkawang ini dapat menjadi dokumen perencanaan yang bermanfaat sebagai pedoman kerja kami dan bisa dilaksanakan dengan baik, sehingga dapat ***Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang, Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan.***

Singkawang, Juli 2022  
Kepala Dinas Perhubungan  
Kota Singkawang

**PETRUS YUDHA SASMITA, SE, S.SiT, MT, MH**

Pembina Tk. I  
NIP. 19750801 200004 1 001